



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

***Systematic Literature Review:***  
**Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU**

Skripsi

Oleh

Tiodora Hutagalung

6071901078

Bandung

2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

***Systematic Literature Review:***  
**Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU**

Skripsi

Oleh

Tiodora Hutagalung

6071901078

Pembimbing

Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Tiodora Hutagalung  
Nomor Pokok : 6071901078  
Judul : *Systematic Literature Review: Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 13 Juli 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

:  31072023

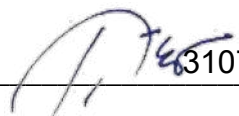
**Sekretaris**

Prof. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D

: 

**Anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

:  31072023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiodora Hutagalung  
NPM : 6071901078  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : *Systematic Literature Review*: Partisipasi  
Masyarakat dalam Program KOTAKU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juni 2023



Tiodora Hutagalung

## ABSTRAK

Nama : Tiodora Hutagalung  
NPM : 6071901078  
Judul : *Systematic Literature Review: Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU*

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui sejumlah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sebagian besar artikel ilmiah menunjukkan kurang optimalnya implementasi program dan salah satu faktor penghambat yang paling banyak disebutkan dalam artikel tersebut adalah partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga bermaksud untuk menilik faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* atau tinjauan literatur sistematis. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait partisipasi masyarakat melalui pengintegrasian sejumlah literatur. Peneliti menggunakan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses*) sebagai panduan dalam melakukan tinjauan literatur sistematis. Untuk menganalisis sejumlah artikel ilmiah, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak berupa VOSviewer, ATLAS.ti, dan Mendeley.

Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar artikel ilmiah menggambarkan partisipasi masyarakat berada pada tingkat menengah, dimana masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan program, tetapi kontribusi tersebut belum tentu dapat mempengaruhi suatu keputusan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat terjadi karena adanya faktor-faktor, seperti kesadaran, sikap atau kebiasaan, persepsi, tingkat pengetahuan, dan kurangnya peran para *stakeholder* dalam menggalakkan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan pada temuan-temuan ini, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk program KOTAKU, yakni perlunya memfasilitasi masyarakat tidak hanya berupa pembangunan dalam bentuk fisik, melainkan juga pembangunan sikap dan persepsi masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), *Systematic Literature Review*

## **ABSTRACT**

Name : Tiodora Hutagalung  
NPM : 6071901078  
Title : *Systematic Literature Review: Community Participation in the KOTAKU Program*

---

*This research also aims to examine the factors that drive and hinder community participation in the implementation of the KOTAKU program. This research aims to examine community participation in the "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU) program through a systematic review of published scholarly articles. The study is motivated by the fact that most of the academic articles indicate suboptimal implementation of the program, with one of the major hindering factors being the lack of community participation, as frequently mentioned in the literature. Furthermore, this research intends to investigate the factors that act as drivers and barriers to community participation in the implementation of the KOTAKU program.*

*The methodology employed in this research is a Systematic Literature Review. The researcher uses this method to obtain a comprehensive overview of community participation by integrating various literature sources. The PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) protocol serves as the guideline for conducting the systematic literature review. To analyze the selected scholarly articles, the researcher utilizes software tools such as VOSviewer, ATLAS.ti, and Mendeley.*

*The findings indicate that most scholarly articles depict community participation at a moderate level, where the community contributes to program implementation, but their contributions may not necessarily influence decision-making. The research also identifies factors contributing to the lack of community participation, such as awareness, attitudes or habits, perceptions, level of knowledge, and insufficient engagement of stakeholders in promoting community involvement. These factors are interrelated and affect community participation in the program. Based on these findings, the researcher recommends that the KOTAKU program should facilitate not only physical development but also the development of community attitudes and perceptions.*

*Keywords: Community Participation, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program, Systematic Literature Review*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Systematic Literature Review: Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU***”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membimbing, memotivasi dan membantu, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan gagasan, petunjuk, saran, serta motivasi selama penyelesaian skripsi.
2. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pendidikan dan bantuan selama perkuliahan.
3. Kedua orangtua dan Kak Luci, Kak Elvi, serta Kak Lina yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan selama kuliah terutama, Christin, Ratna, Tia, Anas, Agnes, dan teman-teman beasiswa APM, SPN, dan BDT Angkatan 2019, yang telah berproses bersama dalam menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Teman-teman seperjuangan skripsi, Jul, Azzara, Faqih, Kak Syafanca, Azka, Ladirra, dan Luthfi.
6. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 23 Juni 2023

Tiodora Hutagalung



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Kegunaan Penelitian.....	11
1.6. Batasan Masalah.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Partisipasi Masyarakat.....	14
2.2. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat .....	26
2.3. Kerangka Berpikir .....	34
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Metode Penelitian.....	36

3.2. Analisis Data .....	39
BAB IV .....	41
OBJEK PENELITIAN DAN TEMUAN .....	41
4.1. Program Kota Tanpa Kumuh .....	41
4.2. Penelitian terkait Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh .....	47
BAB V .....	54
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA .....	54
5.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU ..	54
5.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU .....	61
BAB VI .....	67
KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
6.1 Kesimpulan .....	67
6.2 Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Permukiman Kumuh Tahun 2019 dan 2020 .....	3
--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Ladder of Citizen Participation</i> .....	24
Gambar 2.2 Pemetaan Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat.....	30
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 3.1 Diagram PRISMA .....	40
Gambar 5.1 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berbicara tentang perkembangan dan peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek permukiman. Permukiman memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjabarkan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sarana dan prasarana, serta utilitas umum tersebut dapat berupa sekolah, puskesmas, taman, jalan dan jembatan, serta listrik, air bersih, dan layanan publik lainnya yang disediakan atau dijalankan oleh pemerintah.

Permukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang menunjang penghidupan sudah seharusnya memenuhi kriteria kelayakan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat permukiman di beberapa wilayah terutama perkotaan yang tergolong tidak layak huni atau termasuk dalam kategori permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.<sup>1</sup> Dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

demikian, permukiman kumuh dapat dikenali melalui kondisi dimana terdapat banyak bangunan yang tidak terstruktur dan tidak terpelihara dengan baik.

Di Indonesia, luas wilayah permukiman kumuh pada tahun 1996 mencapai luas 38.000 hektar, dan meningkat menjadi 54.000 hektar pada tahun 2004. Pada tahun 2009, luas permukiman kumuh kembali meningkat, yakni mencapai 57.800 hektar.<sup>2</sup> Dalam hal ini, dapat diamati bahwa luas permukiman kumuh di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan. Hal ini kemudian diperkuat melalui data Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mencatat luas permukiman kumuh pada tahun 2020 mencapai 86.548 hektar, dimana luas ini bertambah sebesar 42.258 hektar dari tahun 2019.

Luas permukiman kumuh terbesar yang tercatat pada tahun 2019 berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 7.300 hektar, diikuti dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat yang mencapai 5.929 hektar dan 4.160 hektar. Sedangkan pada tahun 2020, luas permukiman kumuh terbesar berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai luas 25.155 hektar, diikuti dengan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh yang mencapai 6.206 hektar dan 5.786 hektar.<sup>3</sup> Peningkatan yang signifikan dalam luas permukiman kumuh pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi di beberapa provinsi, seperti pada tabel berikut ini.

---

<sup>2</sup> B. Prayitno, *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 1

<sup>3</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. 'Kawasan Kumuh' diakses melalui <https://data.pu.go.id/dataset/kawasan-kumuh> pada tanggal 17 Maret 2023

**Tabel 1. 1 Luas Permukiman Kumuh Tahun 2019 dan 2020**

Provinsi	Luas Permukiman Kumuh (ha)	
	2019	2020
Aceh	1.069	5.786
Sumatera Utara	193	6.206
Jawa Barat	756	4.572
Kalimantan Barat	444	3.426
Kalimantan Selatan	691	3.271
Sulawesi Tengah	693	25.155

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Data dari tabel di atas menunjukkan peningkatan yang paling signifikan terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana luasnya meningkat sebesar 24.462 hektar. Demikian juga dengan luas permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara yang meningkat secara drastis, yakni dengan penambahan luas sebesar 6.013 hektar. Provinsi Aceh dan Jawa Barat juga mengalami peningkatan yang cukup besar, dimana luasnya bertambah sebesar 4.717 hektar dan 3.816 hektar. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yakni mengalami peningkatan sebesar 2.982 hektar dan Kalimantan Selatan dengan penambahan luas permukiman kumuh sebesar 2.580 hektar.

Permukiman kumuh menurut Clinord (1978), dapat disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk akibat urbanisasi,

serta adanya ketidakmampuan ekonomi dan keinginan politik.<sup>4</sup> Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin tinggi permintaan terkait lahan, sementara dapat diketahui bahwa lahan yang tersedia juga terbatas terutama di daerah perkotaan akibat urbanisasi.<sup>5</sup> Rendahnya perekonomian juga menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk mendirikan pemukiman secara sembarang dan tidak layak huni sehingga hal inilah yang menjadi penyebab munculnya ketidakteraturan bangunan.<sup>6</sup>

Munculnya kawasan permukiman kumuh berpotensi memberikan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut dapat berupa reduksi kualitas lingkungan, dimana terjadi pencemaran karena tidak terpeliharanya lingkungan oleh masyarakat, seperti membuang sampah ke sungai atau secara sembarang yang tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Selain itu, kawasan permukiman kumuh lebih rentan terhadap bencana seperti kebakaran dan banjir. Hal ini karena adanya kepadatan dalam suatu wilayah dengan jarak bangunan yang saling berdekatan sehingga resiko meluasnya api ke bangunan lain juga menjadi tinggi. Demikian juga dengan banjir, dimana kepadatan bangunan dalam sebuah permukiman mengurangi lahan yang dapat digunakan untuk menyerap air.<sup>7</sup>

Meninjau adanya dampak negatif yang dapat terjadi akibat permukiman kumuh, maka upaya untuk mencegah sekaligus menangani permukiman kumuh

---

<sup>4</sup> L. Muta'ali dan A. R. Nugroho, *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 62.

<sup>5</sup> Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2021. 'Kumuh dan Kesadaran Diri' diakses melalui <https://perkim.id/kumuh/kumuh-dan-kesadaran-diri/> pada tanggal 17 Maret 2023

<sup>6</sup> A. R. Sari dan M. A. Ridlo, 'Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan,' *Jurnal Kajian Ruang*, 1 (2021): 166.

<sup>7</sup> L. Muta'ali dan A. R. Nugroho, *Op.cit.*, 70.



sangatlah diperlukan, mengingat luas permukiman kumuh terus mengalami peningkatan. Disamping itu, populasi yang terus meningkat tentunya dapat memicu munculnya permukiman kumuh baru. Hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah populasi Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, dimana ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 yakni, mencapai 272,68 juta jiwa dan 275,77 juta jiwa.<sup>8</sup> Sementara, menurut proyeksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, populasi Indonesia pada tahun 2045 dapat mencapai 321 juta jiwa.<sup>9</sup>

Mengingat bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan permukiman yang layak,<sup>10</sup> maka pemerintah dalam upaya pengentasan permukiman kumuh meluncurkan sejumlah program berskala nasional, diantaranya:<sup>11</sup>

1. *Kampung Improvement Program (KIP).*

Program ini dijadikan sebagai program nasional pada tahun 1974, dimana fokus program ini adalah pada perbaikan atau peningkatan infrastruktur berupa jalan setapak, drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

2. *Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).*

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. 'Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)' diakses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>9</sup> Indonesia Baik. 2019. 'Demografi dan Urbanisasi Indonesia 2010-2045' diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/demografi-dan-urbanisasi-indonesia-2010-2045> pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 (h)

<sup>11</sup> B. Prayitno, *Op.cit.*, 59

Program ini diluncurkan tahun 1999, dimana dibentuk untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.

3. *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).*

NUSSP dibentuk pada tahun 2006, yang mana mengusung konsep kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengentasan permukiman kumuh di permukiman desa dan perkotaan.

4. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).

PLP2K-BK dirancang pada tahun 2010 dengan tujuan untuk menciptakan perumahan dan permukiman layak huni melalui pengintegrasian tindakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aktor kepentingan lainnya dan masyarakat.

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Program ini dirancang dengan tujuan mengatasi masalah kemiskinan di bidang perumahan dan permukiman, dengan fokus pada pengurangan luas permukiman kumuh dan rumah yang tidak layak huni.

Selain program-program di atas, dalam upaya mempercepat penanganan permukiman kumuh, pemerintah juga meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program yang diimplementasikan di 34 provinsi se-Indonesia ini mengusung konsep kolaborasi dengan menekankan peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program KOTAKU disusun dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar sekaligus memperbaiki infrastruktur di daerah permukiman

kumuh, dengan tujuan akhir menciptakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.<sup>12</sup> Program ini sejalan dengan target pertama dari tujuan ke-11 *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana selain untuk memastikan kelayakan perumahan dan pelayanan dasar, juga untuk meningkatkan kondisi lingkungan di permukiman kumuh. Dalam program KOTAKU, peningkatan kondisi atau kualitas lingkungan permukiman kumuh harus mengacu pada tujuh indikator yang digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan, diantaranya, kondisi fisik bangunan, infrastruktur jalan, akses air minum, sistem drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan perlindungan dari kebakaran.<sup>13</sup>

Program yang diperkenalkan pada tahun 2016 ini merupakan inisiatif untuk mencapai tujuan kota bebas permukiman kumuh pada tahun 2019, sejalan dengan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pelaksanaan program di tahun 2017, dapat dikategorikan berdasarkan wujud bantuan yang diberikan pemerintah. Terkait hal ini, terdapat Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh dalam skala lingkungan yang dialokasikan di 1.185 kelurahan/desa yang tersebar di 229 kabupaten/kota dan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) diberikan untuk kegiatan fisik dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh dalam

---

<sup>12</sup> Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2020. 'Program-program dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh' diakses melalui <https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/> pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

skala lingkungan yang dialokasikan di 209 kelurahan/desa yang ada di 20 kabupaten/kota.<sup>14</sup>

Dalam memperoleh gambaran terkait pelaksanaan program secara nasional, peneliti mengkaji sejumlah literatur berupa artikel ilmiah tentang program KOTAKU menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hal ini dilakukan untuk meninjau konsep-konsep apa saja yang diteliti dalam program KOTAKU. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 200 artikel mengenai program KOTAKU, konsep-konsep yang paling banyak ditemukan, yaitu konsep implementasi, evaluasi, *community empowerment*, permukiman kumuh, infrastruktur dan *stakeholder*. Sementara, konsep-konsep yang terhitung sedikit, diantaranya, faktor-faktor, strategi, dan jaringan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap sejumlah artikel ilmiah tentang program KOTAKU, dapat diamati bahwa penelitian yang paling banyak diteliti dari 200 artikel adalah implementasi program KOTAKU, sedangkan penelitian yang paling sedikit diteliti berkaitan dengan jaringan dalam program KOTAKU. Melalui hal ini, peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut terkait konsep implementasi. Selain karena penelitian yang berkaitan dengan konsep tersebut terbilang banyak, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program KOTAKU yang telah diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam mengkaji artikel ilmiah terkait implementasi program KOTAKU, peneliti menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti sebagai alat bantu analisis. Hasil

---

<sup>14</sup> Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor.1K.03-CK/250 tahun 2017 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

kajian tersebut menunjukkan bahwa dari 35 artikel dengan 36 lokasi penelitian yang berbeda, dimana terdapat satu artikel yang membahas 2 lokasi sekaligus, ditemukan sekitar 27 kelurahan/desa yang menyatakan bahwa implementasi program KOTAKU belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat baik dari pihak pelaksana program maupun masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penghambat sekaligus pendorong implementasi program KOTAKU yang paling banyak disebutkan adalah partisipasi. Beberapa penelitian mencatat adanya partisipasi aktif masyarakat, sementara penelitian lain menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses implementasi program.

Dalam konteks program KOTAKU, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting dalam menunjang keberlanjutan program. Meskipun infrastruktur telah dibangun, namun tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan memelihara infrastruktur tersebut, permukiman akan kembali menjadi kawasan kumuh. Apabila hal ini terjadi, maka eksistensi program menjadi tidak bermanfaat. Melalui hal ini, maka dapat dipahami bahwa program KOTAKU dapat berhasil sepenuhnya apabila ada partisipasi atau campur tangan dari masyarakat.<sup>15</sup> Adapun program ini juga dibentuk untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dapat terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai elemen krusial dalam program KOTAKU. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperluas pemahaman tentang partisipasi masyarakat terlebih dahulu, guna

---

<sup>15</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Laporan Akhir Evaluasi Midterm I NSUP (Wilayah Pendanaan IsDB)* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2022), 72.

mengantisipasi potensi permasalahan yang kemungkinan muncul saat program ini diimplementasikan. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan literatur yang sistematis mengenai partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Hal ini dilakukan mengingat urgensi dari partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, dan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang muncul sebagai tren penelitian<sup>16</sup> pada publikasi di pertengahan tahun 2019 hingga 2020 berdasarkan analisis dari 200 artikel terkait program KOTAKU.

Adapun rumusan masalah umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “bagaimana partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU didiskusikan dalam literatur yang ada?”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Sebagian besar artikel ilmiah menyatakan bahwa implementasi program KOTAKU belum optimal.
2. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat implementasi program KOTAKU yang paling banyak dituliskan dalam artikel-artikel ilmiah.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Hasil identifikasi VOSviewer (*overlay visualization*) oleh peneliti

1. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambat masyarakat untuk terlibat dalam program KOTAKU?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong atau faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, serta memperluas pemahaman akan urgensi dari partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pelaksana program KOTAKU maupun program-program selanjutnya dalam upaya mengatasi permukiman kumuh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami

karakteristik masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa depan.

### **1.6. Batasan Masalah**

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU dan tidak menguji hubungan antara partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program.
2. Artikel ilmiah yang digunakan hanya memenuhi kriteria inklusi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang berjudul “*Systematic Literature Review: Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU*”, terdiri dari enam bab, diantaranya:

#### **1. Bab I: Pendahuluan**

Bagian ini menjabarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **2. Bab II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini terdapat teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **3. Bab III: Metode Penelitian**

Bagian ini memuat pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **4. Bab IV: Objek Penelitian**



Bab ini memuat profil dari objek penelitian dan kaitannya dengan fokus penelitian yang dijabarkan menggunakan teori dan kerangka konseptual pada bab II.

#### **5. Bab V: Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini merupakan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka konseptual yang dituliskan di bab II.

#### **6. Bab VI: Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.